

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangatlah vital, selain sebagai salah satu aspek perlindungan terhadap tenaga kerja juga berperan untuk melindungi aset perusahaan. Hal ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan pertimbangan dalam undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses produksi berjalan lancar. Jaminan keselamatan ini membutuhkan prasyarat adanya lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi tenaga kerja dan masyarakat di sekitarnya.⁽¹⁾

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.⁽²⁾

Angka Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di beberapa negara maju menunjukkan kecenderungan meningkat. Sebagai faktor penyebab sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja. Banyak

pekerja yang meremehkan resiko kerja, sehingga tidak menggunakan APD yang sudah disediakan.⁽³⁾

The Domino Theory menurut Heinrich bahwa manusia menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya kecelakaan. Kecelakaan terjadi disebabkan oleh factor manusia yang melakukan tindakan tidak aman. Menurut estimasi International Labor Organization (ILO), sebanyak 2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja tiap tahunnya. Dari jumlah ini, 345.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahunnya ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta terkena penyakit akibat kerja (PAK). Biaya yang harus dikeluarkan untuk bahaya-bahaya akibat kecelakaan iniamat besar. ILO memperkirakan kerugian yang dialami sebagai akibat kecelakaan-kecelakaan dari Produk Domestik Bruto (GDP).⁽⁴⁾

Pada tahun 2009, pemerintah mencatat 54.398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Angka tersebut mengalami tren menurun sejak 2007 yang sempat mencapai 83.714 kasus dan menurun pada 2008 yang hanya 58.600 kasus. Namun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengakui bahwa kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain. Berdasarkan data Depnakertrans, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun cenderung turun dari tahun ke tahun. Tahun 2000 terjadi 98.902 kasus, tahun 2001 terjadi 10.774 kasus, tahun 2002 terjadi 103.804 kasus, tahun 2007 terjadi sebanyak 83.714 kasus. Namun, menurut data yang dilaporkan tahun 2008 adalah 93.823 kasus kecelakaan kerja. Terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2007 yang hanya 83.714 kasus.⁽⁵⁾

Pengendalian kecelakaan kerja dapat dilaksanakan dengan metode: pengendalian teknik/rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi dan higiene sanitasi; pendidikan

dan latihan; pembangunan kesadaran motivasi; evaluasi melalui audit internal, penyelidikan insiden dan etiologi serta penegakan hukum, serta penggunaan APD.⁽⁶⁾

APD sangat diperlukan di tempat kerja. Sedangkan yang dimaksud tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber sumber bahaya. Oleh karena itu barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan untuk mengurangi resiko bahaya.⁽⁷⁾

Penggunaan APD yang baik selain dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari dampak keparahan kecelakaan akibat kerja, juga dapat mendukung kinerja karyawan sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas baik karyawan maupun perusahaan. Besarnya manfaat ini, ternyata masih banyak pekerja yang tidak menggunakannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja sehingga tidak menggunakan APD tersebut.⁽⁸⁾

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010), bahwa didapatkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan penggunaan APD (p value = 0,000 dengan OR 57,694), tidak ada hubungan bermakna antara pelatihan dengan penggunaan APD (p value = 0,938), ada hubungan bermakna antara pengawasan dengan penggunaan APD (p value = 0,000 dengan OR 32,533), dan ada hubungan bermakna antara kebijakan dengan penggunaan APD (p value = 0,000 dengan OR 87,040).⁽³⁾

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatanyang menangani pengelolaan sampah dikota Painan telah mengupayakan berbagai upaya pencegah kecelakaan kerja dengan pengadaan alat pelindung diri berupa helm, sarung tangan, dan sepatu

kerja. Namun dalam pelaksanaannya selalu menghadapi berbagai kendala. Misalnya saja, sangat sulit untuk mengubah kebiasaan pekerja pengangkut sampah yang tidak patuh, enggan dan belum sadar terhadap penggunaan alat pelindung diri walaupun sudah tersedia pada saat sedang bekerja. Untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja belum ada dilakukan pencatatan.

Pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan setiap harinya bekerja memungut, mengumpulkan sampah yang berasal dari sampah Rumah Tangga, pusat-pusat keramaian seperti : Pasar, Ruko, Perkantoran, Rumah Sakit dan sampah jalanan yang dilakukan setiap hari dilingkungan Kota Painan.

Berdasarkan hasil suvey awal dengan 10 orang pekerja pengangkut sampah, ditemukan 60% pekerja pengangkut sampah tidak menggunakan APD saat bekerja, dan tidak merawat APD dengan baik. Berdasarkan wawancara juga ditemukan kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan karena tidak menggunakan APD pada 7 orang pekerja, yaitu berupa tertusuk benda tajam seperti pecahan kaca saat bekerja, kepala memar akibat tertimpa sampah saat pengangkutan ke dalam container, tangan tergores dan luka saat bekerja.

Berdasarkan data dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui “Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri pada Pekerja Pengangkut Sampah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja

pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan”

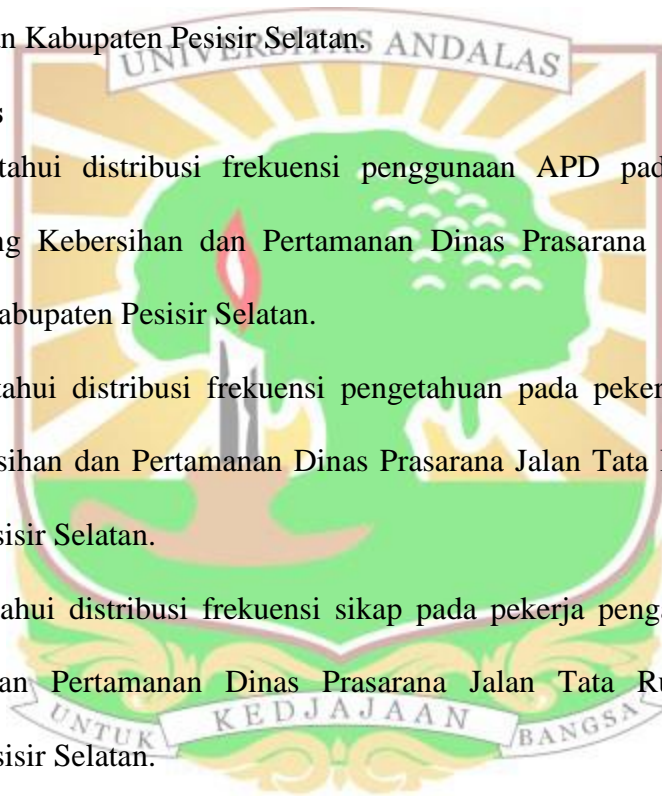
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi ketersediaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengawasan pemakaian APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan



6. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan APD dengan penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Untuk mengetahui hubungan pengawasan APD dengan penggunaan APD pada pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan serta dapat mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya sebagai wahana untuk melatih diri dalam melakukan penelitian di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.
2. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan serta perencanaan pemakaian APD bagi pekerja pengangkut sampah.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi proses kemampuan belajar dan mengajar dalam menerapkan pengetahuan dilapangan, khususnya dalam penerapan mata kuliah Kesehatan Lingkungan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April-Mei 2016. Populasi penelitian meliputi semua pekerja pengangkut sampah Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 207 orang.

